



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat dan Hidayah Allah SWT dan atas Petunjuk-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini sebagai bentuk laporan kinerja selama 1 (satu) tahun atas Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar atas Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dibidang Kesehatan. Ucap terimakasih kepada semua pihak yang mendukung tersusunnya laporan ini, semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 12 Februari 2024,

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

dr. H. HUSAINI, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19651214 199803 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
D. Isu-Isu Strategis	8
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis.....	14
B. Indikator Kinerja Utama	21
C. Rencana Kerja Tahunan	22
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	34
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Pengukuran Kinerja	36
B. Analisis Capaian Kinerja	40
C. Realisasi Keuangan	44
BAB IV : PENUTUP	51
LAMPIRAN	
➤ Perjanjian Kinerja Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut :

1. Sebagai laporan, Laporan Kinerja Tahunan adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.
2. Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Kinerja Tahunan merupakan wujud tertulis pertanggung-jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.
3. Laporan Kinerja Tahunan berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah.
4. Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.

5. Laporan Kinerja Tahunan juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan di latar belakang hal-hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah , juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan salah satu media informasi pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah diberikan kewenangan yang sangat luas kepada Daerah Kabupaten dan Kota. Untuk terselenggaranya pemerintah yang baik, maka perlu didukung oleh kinerja yang baik dan efisien, memenuhi tertib administrasi pemerintahan, penetapan otonomi daerah yang berlandaskan kepada pembagian tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab yang jelas diantara semua tingkat pemerintahan.

Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar didasarkan pada Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Selayar Tahun 2021 – 2026 yang merupakan arah dan pedoman di dalam penyelenggaraan pembangunan sektor kesehatan. Di mana Renstra tersebut mengacu pada Visi Misi dan Program Strategik Bupati Kepulauan Selayar periode 2021-2026.

Kewenangan dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar tertuang dalam Perda Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar dan Perda Nomor 04 Tahun 2020 tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom.

Demikian pula Peraturan Bupati Selayar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas pokok dan Fungsi Organisasi, Kepala Dinas, Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1. Struktur Organisasi, Uraian Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

a. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Peraturan Bupati Nomor : 58 Tahun 2020, pasal 5 terdiri dari :

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat, terdiri atas :

- a) Sub Bagian program;
- b) Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Hukum; dan
- c) Sub Bagian Keuangan.

3) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :

- a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- b) Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga.

4) Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, terdiri Atas :

- a) Seksi Surveilans Dan Imunisasi;
- b) Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- c) Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

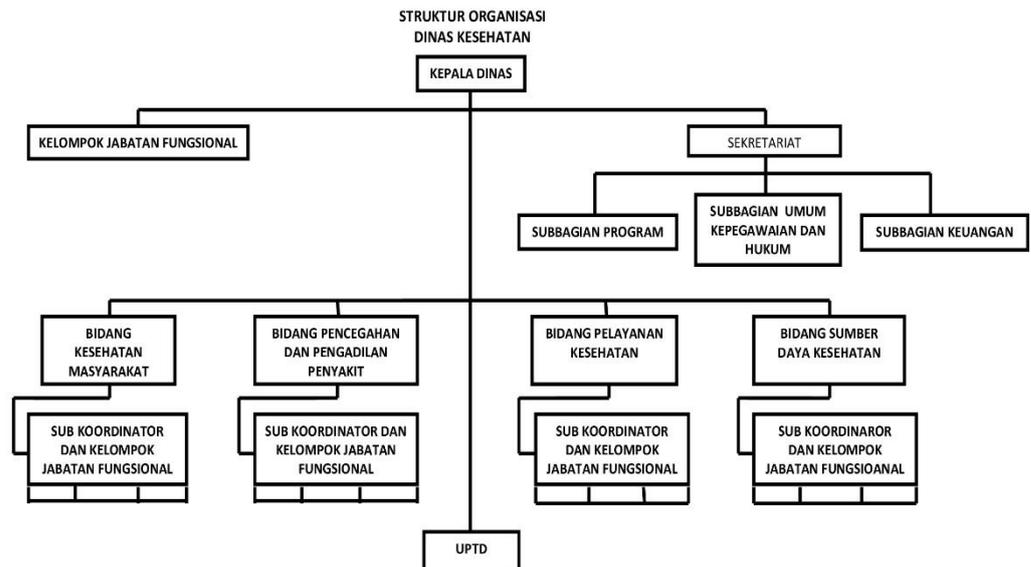
5) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :

- a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- c) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.;

6) Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :

- a) Seksi Kefarmasian;
- b) Seksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
- c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2. Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



3. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

b. Kedudukan

Dinas Kesehatan Kabupaten Selayar yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2020 pada Bagian Ketiga Pasal 11 sampai pasal 13 telah diatur tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Struktur Organisasi dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten di Bidang Kesehatan yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Selayar sesuai Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020, adalah sebagai berikut :

Tugas pokok :

“Dinas Kesehatan adalah Unsur Pembantu Bupati sebagai Pelaksana Otonomi Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan di Bidang Kesehatan”.

1) Fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
- b) Memberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
- c) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Instansi pelayanan kesehatan lainnya;
- d) Pelaksanaan kesehatan medik;
- e) Pelaksanaan pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan;
- f) Pelaksanaan kesehatan masyarakat;
- g) Pelaksanaan pelayanan farmasi dan perbekalan;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

4. Lingkungan Strategik

a. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Keseluruhan Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 yaitu :
2.110 orang yang terdiri eselon II 1 orang, Eselon III 14 orang, eselon IV 47 orang, fungsional tertentu 735 orang, fungsional pelaksana (staff) sebanyak 38 orang, 9 dokter spesialis, 39 dokter umum, 9 dokter gigi, 506 perawat, 641 bidan , 59 tenaga kesehatan masyarakat, 31 tenaga kesehatan lingkungan, 37

tenaga kefarmasian, 29 tenaga Apoteker, 51 tenaga laboratorium, 29 teknisi medis dan 120 tenaga penunjang.

b. Sarana dan Prasarana

Jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan, baik di Puskesmas maupun di Pustu, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes) terdiri dari :

- 1) Dinas Kesehatan : 1 unit (daratan)
- 2) Gudang Farmasi : 1 unit (daratan)
- 3) Puskesmas : 14 unit (9 daratan, 5 kepulauan)
- 4) RSUD : 1 Unit
- 5) RSP : 1 Unit
- 6) Puskesmas Pembantu : 71 unit(daratan/Kepulauan)
- 7) Polindes/Poskesdes : 18 unit (daratan/Kepulauan)
- 8) lauan)
- 9) Kendaraan Roda - 4 Kadis : 1 unit
- 10)Pusk.Keliling Roda -4 : 13 unit(3 baik,10 rusak sedang)
- 11) Ambulans laut : 5 unit
- 12) Ambulance : 43 unit (37 baik, 6 Rusak Berat)
- 13) Puskel Perahu Bermotor : 10 unit (6 Baik, 4 Rusak Berat)
- 14) Kendaraan Dinas Roda-2 : 213 unit (175 baik, 38 rusak)
- 15)Mobil Jenazah : 1 Unit
- 16)Pick Up : 1 Unit

c. Keuangan

Jumlah Anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 sebanyak Rp.167.574.657.011,- termasuk gaji PNS. Adapun anggaran-anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehatan antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 46.148.959.851,-
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 109.629.643.160,-
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp.11.596.054.000,-
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp.200.000.000 ,

D. Isu-Isu Strategis

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu adalah permasalahan-permasalahan yang patut dipertimbangkan. Isu atau permasalahan utama dalam pembangunan pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan kerangka waktunya, yang biasanya dikenal dua jenis isu, yaitu isu umum dan isu spesifik. Isu umum adalah isu yang menyangkut masyarakat, daerah, atau sistem ekonomi daerah secara keseluruhan. Adapun isu spesifik adalah isu-isu yang sama, hanya cakupannya terkait pada sebagian lokasi dan kelompok masyarakat tertentu.

Isu Strategis adalah kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa yang akan datang, sehingga Isu Strategis lebih berorientasi ke masa depan.

a. Isu Strategis Internasional**Fenomena Pandemi Covid-19**

Sejak awal tahun 2020, dunia menghadapi krisis yang belum pernah dialami generasi yang hidup saat ini. Kemampuan kita mengatasi krisis ini akan menentukan bagaimana masa depan kita sebagai bangsa bahkan sebagai umat manusia. Tidak ada satupun individu atau institusi yang pernah memprediksi krisis ini akan terjadi. Jika ingin segera keluar dari krisis atau paling tidak mengurangi sangat ditentukan oleh keputusan yang diambil saat ini. Keputusan yang dimasa normal dapat diambil dalam waktu bukan atau bahkan tahun, sekarang harus diputuskan dalam hitungan hari bahkan jam.

Diawal terjadinya, masyarakat dunia dikejutkan oleh wabah COVID-19 yang menewaskan banyak orang di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Lalu kemudian merebak dengan cepat hampir merata ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran apabila pemimpin-pemimpin pemerintahan di banyak negara berjuang untuk keluar dari wabah COVID-19 dengan pendekatannya masing-masing. Ada yang menutup jalur migrasi manusia dari dan ke China, melakukan karantina pada orang-orang yang baru kembali bepergian dari China, hingga melakukan rapid-test sebagai bentuk antisipasi penyebaran. Dikenallah istilah kebijakan Lock-down atau isolasi dari dan ke negara tertentu atau dari satu wilayah ke wilayah lain di suatu negara) baik total maupun parsial seperti yang dilakukan di Indonesia dimana masyarakatnya bekerja dan belajar di rumah serta dengan menginstruksikan pembatasan social (social distancing). Hal terakhir dengan dilarang berkerumun banyak orang serta membuat jarak antar orang minimal 1,5 meter.

Kejadian yang berlangsung sudah memasuki tahun kedua ini, sangat berdampak terhadap segala sendi kehidupan masyarakat. Dampak paling terasa IV - 20 terjadi pada dimensi ekonomi, sosial, dan kehidupan kemasyarakatan. Dari segi perekonomian sebagai urat nadi

kehidupan, Covid-19 memukul baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Semua aktifitas ekonomi dipengaruhi hampir semua sektor, baik produksi, perdagangan, pariwisata, manufaktur, sampai mobilitas manusia dan barang melalui penerbangan. Tak terkecuali mempengaruhi postur APBD yang berubah-ubah sejak ditetapkan karena adanya kebijakan Refocusing anggaran untuk memberikan ruang pembiayaan terhadap penanggulangan covid-19 berupa biaya terkait kesehatan, penanggulangan bencana, perlindungan sosial dan bantuan ekonomi masyarakat dengan berbagai macam bentuknya termasuk dana stimulus KUR, insentif pajak, BPJS Ketenagakerjaan dan bantuan langsung tunai.

Belanja kesehatan menjadi fokus pada sisi belanja dengan memastikan bahwa Covid 19 dapat ditangani termasuk dampaknya, dan perekonomian bisa menjadi baik. Karena tren kenaikan covid 19 masih ada dan antisipasi pemerintah sudah sangat masif diadakan termasuk kebijakan belanja pembangunan dialokasikan khusus menangani dampak covid termasuk pelaksanaan vaksinasi dan pengembangan inovasi pembangunan saat pandemi dalam bentuk new normal life.

b. Isu Strategis Nasional

Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 12, Pasal 18 dan Pasal 298 terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah. Adapun 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat. Inilah salah satu perbedaan paradigma penerapan SPM menurut Undang-undang 23 Tahun 2014, dimana SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Perubahan mendasar terletak dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Jenis SPM menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, terkait dengan Jenis Layanan Dasar Kabupaten/ Kota berjumlah 29 jenis layanan dasar. Masing-masing jenis layanan dasar tersebut diurai sebagai berikut :

- a) SPM Pendidikan 3 jenis layanan dasar yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan; IV - 25
- b) SPM Kesehatan 12 jenis layanan dasar yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis orang terduga tuberkulosis, dan pelayanan

kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

- c) SPM Pekerjaan Umum 2 jenis layanan dasar yaitu pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- d) SPM Perumahan Rakyat 2 jenis layanan dasar yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- e) SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 5 jenis layanan dasar yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
- f) SPM Sosial 5 jenis layanan dasar yaitu rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti anak telantar, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti lanjut usia telantar, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti gelandangan dan pengemis, perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

c. Isu Strategis Daerah**Mendekatkan Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat**

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continously). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perumusan rencana strategis dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, hal ini dilakukan agar akuntabilitas pencapaian sasaran program kegiatan yang mendukung sasaran strategis dapat disajikan.

a. Tujuan dan Sasaran RPJMD kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026. Kemudian disusunlah tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bentuk pernyataan-pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun tujuan, sasaran dan strategis RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026

Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1. Meningkatnya efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, penguatan system kelembagaan dan pengawasan, dan meningkatnya inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
Misi 2 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Perdesaan		
2. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan	2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan.	2. Mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat perdesaan dan kualifikasi desa.
	3. Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas perekonomian perdesaan.	3. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya local dalam rangka mengembangkan lapangan kerja dan lapangan usaha di perdesaan.
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		
3. Meningkatkan Fasilitas pembangunan sumber daya Manusia	4. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar Masyarakat	4. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan Pendidikan dan Kesehatan
	5. Meningkatnya daya beli Masyarakat	5. Meningkatkan pendapatan masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi
	6.	6.
Misi 4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman		
4. Mengoptimalkan fasilitas pembangunan sumber daya manusia	6. Meningkatnya usaha perikanan	6. Memperkuat dukungan sarana dan prasarana perikanan, penciptaan nilai tambah melalui pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	7. Meningkatnya Usaha Pariwisata	7. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana kepariwisataan, daya Tarik destinasi, ekonomi kreatif, promosi, dan sumberdaya manusia pariwisata
	8. Meningkatnya usaha industry, transportasi dan perdagangan	8. Memperkuat dukungan sarana dan prasarana pengembangan industry, peningkatan akses tranportasi dan infrastruktur Pelabuhan, dan akselerasi perdagangan dalam dan luar wilayah melalui Kerjasama antar daerah
Misi 5 : Meningkatnya Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan		
5. Meningkatnya aktualisasi nilai budaya	9. Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan local dengan mengaktualisasikan pada kehidupan social	9. Meningkatkan peran Lembaga sosial dan keagamaan dalam pembangunan manusia dan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	10. Meningkatkan toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	
Misi 6 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
7. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	11. Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021

Melihat dari tabel diatas, Dinas Kesehatan mendukung pada misi 1, tujuan 1, sasaran 1 dan misi 3, tujuan 3, sasaran 4, Adapun sasarannya yaitu : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

b. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan

Berdasarkan Visi Misi yang telah dirumuskan serta mempertimbangkan nilai – nilai dan factor – factor kunci keberhasilan maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang dimana tercantum dalam Rencana Srategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026, Adapun tujuan dan sasaran Dinas kesehatan dalam kurun waktu 5 tahun sebagai berikut :

Tabel 2.2 Matriks Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2023			Target Kinerja Tahun Ke-				
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	68,97	69,23	69,48	69,74	70
		Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	190/100.000 KH	180/100.000 KH	170/100.000 KH	160/100.000 KH	150/100.000 KH
		Angka Kematian bayi per 1.000 KH	4,4/1000 KH	4,3/1000 KH	4,2/1000 KH	4,1/1000 KH	4/1000 KH
		Prevalensi balita gizi kurang	4	3,5	3	2,5	2
		Persentase Balita Gizi Buruk (sangat kurus)	0,8%	0,7%	0,6%	0,5%	0,4%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

		Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua tipe (success rate)	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase UCI Desa	85%	90%	95%	90%	100%
		Persentase pelayanan hipertensi (HT)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Rumah tangga berPHBS	67%	69%	71%	73%	75%
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Aktif	90%	100%	100%	100%	100%
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	Indeks Reformasi Birokrasi	55,00 (CC)	64,00 (CC)	68,00 (B)	73,00 (B)	76,00 (A)
		Nilai Sakip OPD	60,00 (B)	65,00 (B)	70,00 (B)	75,00 (B)	80,00 (A)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	70,00	72,50	75,00	80,00	85,00
		Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber :Renstra Dinas Kesehatan Kep. Selayar 2021-2026

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan merupakan cara dan arah Tindakan yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam periode 5 tahun. Adapapun strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026 dapat dijabarkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Meningkatnya Akuntabilitas perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan sumber daya manusia aparatur.	Peningkatan kapabilitas kelembagaan , koordinasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia.
MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan serta pengendalian penyakit	Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kualitas SDM Kesehatan serta Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan
		Meningkatkan Upaya Promotif dan Preventif	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kep. Selayar 2021-2026

B. Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penetapan kinerja anatara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, dan target kinerja dan anggaran.

Dinas Kesehatan telah melaksanakan rekomendasi hasil reviu Sakip OPD yakni dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 01/I/Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kep. Selayar Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	(Jumlah angka usia harapan hidup / Jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu Tahun tertentu x 100)	BPS
2	Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Ibu	(Jumlah Kematian Ibu Hamil, bersalin dan nifas dalam satu Tahun / Jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama x 100)	Dinas Kesehatan Kep Selayar
		Angka Kematian Bayi	(Jumlah kematian anak usia kurang dari satu Tahun (Bayi) dalam satu Tahun / Jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama x 1.000)	Dinas Kesehatan Kep Selayar
3	Meningkatnya Status Gizi Balita	Prevalensi Balita Gizi Kurang	(Jumlah kasus Gizi kurang yang ditemukan / Jumlah balita yang ada x 100)	Dinas kesehatan Kep Selayar
		Persentasi balita Gizi Buruk	(Jumlah kasus Gizi Buruk yang ditemukan / Jumlah balita yang ada x 100)	Dinas Kesehatan Kep Selayar

Sumber : Dokumen IKU Dinas Kesehatan Kep. Selayar 2023

C. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahun 2023, Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar melaksanakan 4 Program, 14 kegiatan dan 58 Sub Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.5 Croscutting Sasaran Program dan Anggaran Rencana Kerja tahun 2023

No	Sasaran	Program	Anggaran	Persentase Anggaran	Ket
1	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Rp. 46.148.959.851	100%	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Program Pemenuhan Upaya-Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.109.629.643.160	100%	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya Status Gizi Balita	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 11.596.054.000	100%	Dinas Kesehatan
4	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 200.000.000	100%	Dinas Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan Kep. Selayar Tahun 2023

Tabel 2.6 Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kep. Selayar Tahun 2023

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	02	01	2.01		<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana kerja tahun OPD (Renja pokok dan rena perubahan	Kabupaten Kep Selayar	2 Dokumen	116.323.000
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Perangkat daerah	Kabupaten Kep Selayar	1 Dokumen	5.000.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Perubahan perangkat daerah	Kabupaten Kep Selayar	1 Dokumen	5.000.000
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen DPA Pokok	Kabupaten Kep Selayar	1 Dokumen	5.000.000
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen DPA Perubahan	Kabupaten Kep Selayar	1 Dokumen	5.000.000
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Kep Selayar	3 Dokumen	59.960.000
1	02	01	2.01	07	Evaluasi perangkat daerah	Terlaksananya Capaian Laporan Kinerja	Kabupaten Kep Selayar	1 Thun	91.250.000
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Kep Selayar	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	42.331.507.622
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Kabupaten Kep Selayar	1 Dokumen	5.000.000
1	02	01	2.02	04	Koordinasi dan pelaksanaan ankutansi SKPD	terlaksananya perjumlahan keuangan	Kabupaten Kep Selayar	2 Dokumen	4.252.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Aset dan Laporan Keuangan yang disusun	Kabupaten Kep Selayar	1 dokumen	5.000.000
1	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan	Kabupaten Kep Selayar	1 dokumen	5.000.000
1	02	01	2.02	07	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	terpantaunya pelaporan keuaangan baik perbulan maupun persemester	Kabupaten Kep Selayar	1 dokumen	5.000.000
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	ketersediaan arsip dan dokumen penyusunan laporan barang milik daerah	Kabupaten Kep Selayar	14 Puskesmas	65.000.000
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	02	01	2.05	02	Monitoring Evaluasi dan Penilaian kinerja pegawai	terlaksananya evaluasi dan penilaian kinerja monitoring	Kabupaten Kep Selayar		10.000.000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ketersediaan perlengkapan dan peralatan kantor dinas kesehatan dan jaringannya	Kabupaten Kep Selayar	Meja,Kursi,Leamri arsip,leptop,printer,sceen	473.990.000

1	02	01	2.06	02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ketersediaan alat dan bahan cetak dan penggandaan dinas kesehatan dan jaringannya	Kabupaten Kep Selayar		12.742.120
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ketersediaan dokumen bacaan dan perundang-undangan dinas Kesehatan	Kabupaten Kep Selayar	Majalah dan koran	8.040.000
1	02	01	2.06	04	Fasilitasi Kunjungan Tamu	adanya ketersediaan konsumsi tamu	Kabupaten Kep Selayar	260 kotak	15.675.000
1	02	01	2.06	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya laporan konsultasi dan koordinasi SKPD	Kabupaten Kep Selayar	1 Tahun	695.237.000
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	02	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Kabupaten Kep Selayar		211.675.000
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	adanya laporan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dinas kesehatan dan jaringannya	Kabupaten Kep Selayar	3 Paket	850.098.695

1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ketersediaanya segala kebutuhan pelayanan umum kantor Dinas Kesehatan	Kabupaten Kep Selayar	1 Tahun	151.946.414
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas untuk memudahkan proses operasional kantor dan lapangan	Kabupaten Kep Selayar	223 Unit	488.294.000
1	02	01	2.09	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kabupaten Kep Selayar	1 unit	504.739.000
1	02	01	2.09	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	meningkatkan kenyamanan dan keamanan pegawai dinas Kesehatan	Kabupaten Kep Selayar	26 Unit	18.230.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Presentase Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Jaringan	Kabupaten Kep Selayar	1 Paket	34.783.248.744

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1	02	02	2.01	02	Pengembangan Rumah Sakit	Presentase Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Jaringan	Kabupaten Kep Selayar	1 Paket	250.000.000
1	02	02	2.01	03	Pengembangan Puskesmas	Presentase Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Jaringan	Kabupaten Kep Selayar	3 Unit	1.400.951.568
1	02	02	2.01	04	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Jaringan	Kabupaten Kep Selayar	1 Paket	2.300.000.000
1	02	02	2.01	05	Pengadaan Obat, Vaksin	Presentase Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Jaringan	Kabupaten Kep Selayar	1 Paket	640.544.630
1	02	02	2.01	06	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Presentase Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Jaringan	Kabupaten Kep Selayar	1 Paket	207.188.000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Kabupaten Kep Selayar		1.016.250.000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Meningkatkan angka harapan hidup ibu	Kabupaten Kep Selayar		148.015.000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Menelusuri penyebab dari kematian/kesakitan ibu perinatal dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian berupa	Kabupaten Kep Selayar		1.161.527.000

						dimasa yang akan datang			
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Kabupaten Kep Selayar		419.500.000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Kabupaten Kep Selayar		645.270.000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Meningkatkan Pengetahuan Pengelola Lansia untuk mmendapatkan lansia sehat dan produktif	Kabupaten Kep Selayar		276.674.000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Kabupaten Kep Selayar		85.500.000
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Meningkatkan penemuan dan deteksi dini Tb dan masyarakat dan kelompok berisiko	Kabupaten Kep Selayar		200.328.000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya sero survei penyakit HIV/AIDS	Kabupaten Kep Selayar		149.390.000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terpenuhinya Gizi Masyarakat	Kabupaten Kep Selayar	14 Pkm	349.133.000

1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	tercapainya pembinaan dan pengawasan TTU, Tercapainya pengelollan sampah medis ,tercapainya penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH)dan terlaksananya pembangunan jamban keluarga	Kabupaten Kep Selayar		7.482.388.981
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kabupaten Kep Selayar		367.166.000
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kelompok asuhan mandiri mampu melakukan asuhan mandiri dengan pemanfaatan TOGA dan Peningkatan Capaian program Yankestrad	Kabupaten Kep Selayar		154.895.000
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya sinergisitas dan kolaborasi program di Puskesmas	Kabupaten Kep Selayar		1.017.195.000
1	02	02	2.02	15	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	terlaksananya surveilans dalam penyakit corona virus di kab kep selayar ,terlaksananya transportasi petugas posbindu dan tersedianya regent deteksi dini	Kabupaten Kep Selayar		1.981.975.837

						PTM			
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta jaminan kesehatan yang dilayani dan jumlah peserta Jkn yang ditangani	Kabupaten Kepulauan Selayar	7661 jiwa	40.277.422.400
1	02	02	2.02	17	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	tercapainya operasional kabupaten kota	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Kabupaten	5.000.000
1	02	02	2.02	18	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang mendapat bantuan operasional kesehatannya	Kabupaten Kepulauan Selayar	14 Puskesmas	13.120.863.000
1	02	02	2.02	19	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Kepulauan Selayar		974.217.000
1	02	02	2.02	20	Pengelola Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis		Kabupaten Kepulauan Selayar	115 Orang	141.750.000

1	02	02	2.02	21	Pengelola Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)		Kabupaten Kep Selayar		68.250.000
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	02	02	2.04	01	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Peningkatan Capaian Program Kesehatan Rujukan	Kabupaten Kep Selayar	14 Puskesmas	5.000.000
1	02	03	2.02		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
1	02	03	2.02	03	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
1	02	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Kabupaten Kep Selayar	100%	219.590.000
1	02	03	2.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	02	03	2.02	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten Kep Selayar	100%	11.376.464.000

1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Kabupaten Kep Selayar	63 Posyandu	200.000.000
TOTAL PAGU									167.574.657.011

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dan rencana kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kep Selayar Tahun Anggaran 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	72,50
			Angka Usia Harapan Hidup	69,23
2.	Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber daya Manusia	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	68,60
			Indeks Kesehatan	68,61

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kep Selayar

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Adapun Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang telah diperjanjikan Kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati Kepulauan Selayar tahun 2023. Dengan perhitungan Capaian Kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Rencana}}$	X 100%
---	---	--	--------

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau Muda
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning Tua
4	51% ≤ 65%	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

Sebagai implementasi dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar Nomor : /I/Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian IKU Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Angka	69,23	73,27	105,83 %
2	Menurunnya angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Ibu	Angka	180/100.00 KH	150/100.00 KH	88,33%
		Prevelensi Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	Angka	4,3/1000 KH	3,1/1000 KH	72,09%
3	Meningkatkannya Status Gizi Balita	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Angka	3,5	7,04 %	100%
		Presentase Balita Gizi Buruk (Sangat Kurus)	Persen	0,7	0,16	100%

Adapun sasaran, indikator dan capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Urusan dinas Kesehatan Kepulauan Selayar Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kode
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Angka	69,23	73,27	100%	
	Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Ibu	Angka	180/100.000 KH	150/100.000 KH	88,33%	
		Angka kematian Bayi	Angka	4,3/1000 KH	3,1/1000 KH	72,09%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kode
	Meningkatnya Status Gizi Balita	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Angka	3,5	7,0	100%	
		Persentase Balita Gizi Buruk (Sangat Kurus)	Angka	0,7	0,16	100%	
	Meningkatnya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular	Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua tipe (success rate)	%	90%	87,97 %	97,74%	
		Persentase UCI Desa	%	90%	82%	91,11%	
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Persentase Pelayanan Hipertensi (HT)	%	100%	100%	100%	
	Meningkatnya PHBS Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga berPHBS	%	69%	65,66 %	95,15%	

Sumber : Dinas Kesehatan Kep Selayar 2023

Dinas Kesehatan memiliki 9 (Sembilan) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 7 (tujuh) sasaran strategis Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar.

Upaya – upaya yang di lakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam peningkatan capaian dan realisasi kegiatan di bidang Kesehatan antara lain :

1. Dinas Kesehatan berupaya menyediakan Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang berkualitas.
2. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi unruk meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang upaya pemeliharaan kesehatan.
3. Berupaya mentediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal.
4. Membentuk Kader disetiap Desa untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan.

Adapun faktor – faktor yang menghambat pencapaian program kesehatan antara lain ;

1. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar Yang terdiri dari Kecamatan Kepulauan, sehingga ada beberapa daerah kepulauan yang sangat sulit di jangkau.
2. Masih kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan terutama masyarakat yang berdomisili di wilayah kepulauan yang susah terjangkau.
3. Keterbatasan Anggaran
4. Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai terutama di wilayah Kecamatan Kepulauan
5. Kurangnya partisipasi masyarakat.

B. Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya hasil pengukuran dijabarkan sesuai dengan Analisa pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pencapaian realisasi masing-masing indikator. Berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta Indikator-Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 :

a. Pengukuran Capaian Sasaran ke - 1

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke-1 mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, sasaran ke-1, dengan inidikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran	:	Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Angka kematian Bayi (AKB)
Indikator	:	1. Angka Kematian Ibu; 2. Angka Kematian Bayi

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi kinerja sasaran ke-1

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2022)	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Angka Kematian Ibu	0,15%	180 /10 0.00 0 KH	150 /10 0.0 00 KH	88,33 %	150/100.00 0 KH	150/100.00 0 KH
2.	Angka Kematian Bayi	0,62%	4,3/100 OKH	3,1 /10 00 KH	72,09 %	4/100 0 KH	4/100 0 KH

Sumber Dinas Kesehatan Kep Selayar 2023

keterkaitan antara sasaran pembangunan daerah dengan program prioritas pembangunan daerah seperti tertuang pada dokumen RKPD perubahan tahun 2023 halaman 108 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2023

NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1.	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat	Indeks Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (SPM)	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Dinkes
					Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Dinkes
				Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan (dokter, tenaga medis dan bidan) per satuan penduduk	Dinkes

Tabel 3.5 diatas menunjukkan keselarasan terkait indikator kinerja Program kegiatan dengan indikator sasaran prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Adapun perumusan program prioritas tahun 2023 terdiri dari Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, yang diarahkan pada Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat.

❖ **Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2026**

Melihat dari keterkaitan target dan capaian akhir Renstra terkait capaian indikator ke-1, dan ke-2 maka dapat dilihat bahwasanya tahun pertama renstra telah mencapai target yang ingin diraih yaitu sebesar %.

❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensi**

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran Pertama ini didukung oleh **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** dan **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** yang terdapat di tiga Bidang yakni Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Tabel 3.6

Sasaran	Program/Kegiatan
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat	1. Program Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	c. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah

	Kabupaten/Kota
	2. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	a. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Adapun alokasi dan realisasi untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran ke-1

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kematian Ibu	180/100.000 KH	150/100.000 KH	88,33%
Angka Kematian Bayi	4,3/1000 KH	3,1/1000 KH	72,09%

Dari tabel diatas mencapai sasaran tersebut sebesar 88,33% dan 72,09%.

b. Pengukuran Capaian Sasaran ke - 2

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke-2 mempunyai 2 (dua) indikator kinerja. Sasaran ke-2 ini menjadi sasaran yang berfokus pada peningkatan Status Gizi Balita, sasaran ke-2, dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran	:	Meningkatnya status Gizi Balita
Indikator	:	1. Prevalensi Balita Gizi Kurang 2. Persentase Balita Gizi Buruk

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Target dan Realisasi kinerja sasaran ke-2

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2022)	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian		
3.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	5,81%	3,5	7,04	100%	2,0	2,0
	Persentase Balita Gizi Buruk	100%	0,7	0,16	100%	0,4%	0,4%

➤ **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator ke-3**

- ❖ Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-2 dengan indikator kinerja sasaran yaitu **Prevalensi Balita Gizi Kurang** Sebesar 100 %

➤ **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator ke-4**

- ❖ Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-2 dengan indikator kinerja sasaran yaitu **Persentase Balita Gizi Buruk 100 %**.

- ❖ **Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2026**

Melihat dari keterkaitan target dan capaian akhir Renstra terkait capaian indikator ke-4, maka dapat dilihat bahwasanya tahun pertama renstra telah mencapai target yang ingin diraih yaitu sebesar 100%

C. Realisasi Keuangan

Anggaran menjadi faktor pendukung dan berpengaruh dalam rangka mencapai indikator keberhasilan. Program dan kegiatan juga dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang memadai. Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp.167.557.657.011,00,- dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.9 target belanja Dinas Kesehatan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	target	Persentase
1	Belanja Operasi	Rp. 128.738.445.199,00	10,57%
1.1	Belanja Pegawai	Rp.42.413.817.622,00	1,53%
1.2	Belanja Barang Jasa	Rp.78.855.801.096,00	19,19%
1.3	Belanja Hibah	Rp.7.468.826.481,00	126,33%
2	Belanja Modal	Rp.38.836.211.812,00	63,00%
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.3.307.765.560,00	82,17%
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.34.282.446.252,00	63,61%
2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.1.246.000.000,00	86,10%

Adapun sumber pembiayaan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023

No	URAIAN	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi Tertimbang	
					Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.148.959.851	43.065.367.548	3.083.592.303	93	93,32
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	287.533.000	283.214.000	4.319.000	100	98,50
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	116.323.000	116.323.000	0	100	100
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.0000	5.000.000	0	100	100
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.0000	1.481.000	3.519.000	30	29,63
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.0000	5.000.000	0	100	100
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.0000	4.650.000	350.000	100	93
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.960.000	59.510.000	450.000	100	99,24
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.250.000	91.250.000	0	100	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.355.759.622	39.460.748.306	2.895.011.316	100	93,17
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.331.507.622	39.436.496.306	2.895.011.316	100	93,17
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	5.000.000	0	100	100
	3 Koordinasi dan Pelaksanaan anktansi SKPD	4.252.000	4.252.000	0	100	100
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	0	100	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi Tertimbang		
					Fisik	Keuangan	
	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	5.000.000	0	100	100
	6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	5.000.000	5.000.000	0	100	100
3		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	65.000.000	64.950.000	50.000	100	99,92
	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Brang Milik Daerah Pada SKPD	65.000.000	64.950.000	50.000	100	99,92
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	0	100	100
	1	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	10.000.000	0	100	100
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.205.684.120	1.162.743.278	42.940.842	100	96,44
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	473.990.000	435.975.000	38.015.000	100	91,97
	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.742.120	10.182.000	2.560.120	80	79,90
	3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.040.000	7.500.000	540.000	100	93,28
	4	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.675.000	15.675.000	0	100	100
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	695.237.000	693.411.278	1.825.722	100	99,73
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.675.000	208.180.000	3.495.000	100	98,35
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	211.675.000	208.180.000	3.495.000	100	98,35
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.002.045.109	894.773.249	107.271.860	100	89,29
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	850.098.695	743.108.249	106.990.446	100	87,41

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi Tertimbang		
					Fisik	Keuangan	
	2	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	151.946.414	151.665.000	281.414	100	99,81
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.011.263.000	980.758.715	30.504.285	100	96,98
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	488.294.000	483.041.665	5.252.335	100	98,92
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	504.739.000	479.502.050	25.236.950	100	95
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya	18.230.000	18.215.000	15.000	100	99,91
2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	109.629.643.160	79.020.183.142	30.609.460.018	73	72,07
1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	39.581.932.942	39.129.750.957	452.181.985	99	98,85
	1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	34.783.248.744	34.477.017.039	306.231.705	100	99,11
	2	Pengembangan Rumah Sakit	250.000.000	250.000.000	0	100	100
	3	Pengembangan Puskesmas	1.400.951.568	1.283.882.358	117.069.210	100	91,64
	4	Pengadaan Prasarana Dan Pendudukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.300.000.000	2.273.692.000	26.308.000	100	98,85
	5	Pengadaan Obat Vaksin	640.544.630	637.971.560	2.573.070	100	99,59
	6	Pengadaan Bahan Habis Pakai	207.188.000	207.188.000	0	100	100
2		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	70.042.710.218	39.885.442.185	30.157.268.033	60	56,94

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi Tertimbang	
					Fisik	Keuangan
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.016.250.000	718.394.050	297.855.050	71	70,69
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	148.015.000	91.375.000	56.640.000	62	61,73
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.161.527.000	1.161.527.000	0	100	100
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	419.500.000	419.500.000	0	100	100
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	645.270.000	543.867.344	101.402.656	85	84,28
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	276.674.000	227.250.000	49.424.000	83	82,13
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	85.500.000	85.500.000	0	100	100
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	200.328.000	200.328.000	0	100	100
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	217.640.000	149.390.000	68.250.000	70	68,64
10	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	349.133.000	254.580.000	94.553.000	73	72,91
11	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.482.388.981	6.569.406.204	912.982.777	88	87,79
12	Pengelolaan pelayanan promosi Kesehatan	367.166.000	340.289.500	26.876.500	93	92,68
13	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan mandiri, Dan Tradisional lainnya	154.895.000	154.674.540	220.460	100	99,85
14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.017.195.000	979.568.700	37.626.300	100	96,30
15	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.981.975.837	1.592.716.249	389.259.588	81	80,36

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi Tertimbang		
					Fisik	Keuangan	
	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	40.277.422.400	35.251.316.855	5.026.105.545	88	87,52
	17	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	5.000.000	4.986.000	14.000	100	99,72
	18	Operasional Pelayanan Puskesmas	13.120.863.000	9.111.230.731	4.009.632.269	70	69,44
	19	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	974.217.000	954.453.070	19.763.930	100	97,97
3		Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas C,D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.990.000	10.000	100	99,8
	1	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kesehatan Rujukan	5.000.000	4.990.000	10.000	100	99,8
3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11.596.054.000	10.241.169.200	1.354.884.800	90	88,31
1		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	219.590.000	37.360.000	182.230.000	20	17,01
	1	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan	219.590.000	37.360.000	182.230.000	20	17,01
2		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.376.464.000	10.203.809.200	1.172.654.800	90	89,69
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.376.464.000	10.203.809.200	1.172.654.800	90	89,69
4		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100
1		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100
	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100
		TOTAL	167.574.657.011	151.451.612.948	16.123.044.063	95	90,37

BAB 4 PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Selayar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999; tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pencapaian indikator kinerja melalui pengukuran kinerja yang telah dievaluasi, berdasarkan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Pencapaian ini merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2023. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi diantaranya permasalahan waktu dan kesiapan termasuk di dalamnya masalah biaya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ini merupakan LAKIP yang ke Dua Puluh Tiga sejak berlakunya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan penyusunan LAKIP dimulai tahun 2000. Wassalam,

Benteng, 12 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN

**KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR**

dr. H. HUSAINI, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005